

ANALISIS KECEMBURUAN SOSIAL MASYARAKAT NON PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SELONG LOMBOK TIMUR

H. MOH. JUHAD

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong
Corresponding email : Mohjuhad63@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan komprehensif terkait dengan kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat program keluarga harapan (pkh) di Kecamatan Selong Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan prosedur *purposive*. Pada penelitian ini subjeknya terdiri atas Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur 1 orang, Kepala Seksi di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang menangani PKH 1 orang, penerima manfaat PKH 5 orang, dan masyarakat non penerima manfaat 7 orang di Kecamatan Selong. Dari Hasil Penelitian ini bahwa Terdapat kebenaran terjadinya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Timur, dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang ditemukan, gosip-gosip yang beredar, terlalu sedikitnya KPM yang dapat PKH dibandingkan jumlah keluarga miskin, dan jumlah dana yang diterima oleh KPM relatif besar. Penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yaitu a. Sosialisasi yang tidak sempurna, b. Rasa ketidakadilan, dan c. Pola hidup konsumtif KPM. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu a. Penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan b. Mengintensifkan sosialisasi PKH, dan c. Profesionalisme penyelenggaraan PKH

Kata kunci : kecemburuan sosial, masyarakat non penerima manfaat, PKH

LATAR BELAKANG

Kecemburuan sosial bisa berupa bentuk keinginan memiliki barang yang orang lain miliki, seperti handphone merek tertentu. Tas, sepatu atau baju dengan merek (*Brand*) yang ternama & diproduksi dalam jumlah yang sedikit demi menjaga harga tinggi dari barang tersebut. Dan semua kecemburuan sosial dalam bentuk materi seperti itu wajar saja terjadi, dalam kadar yang masih terkontrol. Kadar yang masih wajar sebagai kecemburuan berdasar pada daya beli sang pencemburu dan tidak menimbulkan efek negatif dari kecemburuannya. Sebuah contoh seperti halnya seorang perempuan yang kurang mampu kemudian cemburu terhadap temannya yang mampu membeli handphone terbaru, bermerek dan berharga mahal. Sehingga demi mengejar *prestise* (gelar) setara dengan temannya tersebut, si anak gadis melakukan hal negatif semisalnya menjual diri atau menjual barang haram atau hal negatif lainnya karena mengejar kesombongan itu.

Percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, dimulai pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan (Habibullah, dkk, 2017:2).

Meskipun dinilai program perlindungan sosial paling efektif namun berdasarkan penelitian tentang PKH yang dilaksanakan oleh Nainggolan, dkk (2012, 20) ditemukan kasus pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bantuan tunai digunakan untuk membeli barang konsumtif seperti untuk beli HP, rokok dan motor. Berdasarkan penelitian Punali (2014), sebagian besar rumah tangga penerima dana bantuan PKH menggunakan dana bantuan yang mereka peroleh untuk keperluan rumah tangga yaitu mencapai 60,5 persen. Pemanfaatan bantuan PKH yang tidak sesuai dengan ketentuan dikhawatirkan “menggangu” pencapaian tujuan program secara keseluruhan, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi (Habibullah, dkk, 2017:2-3).

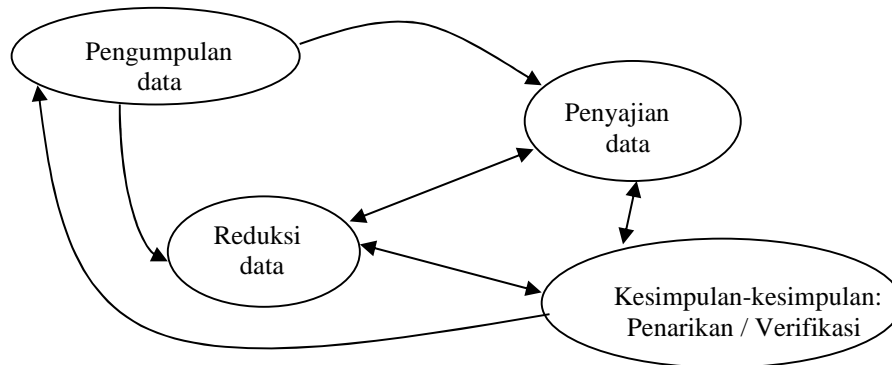
Masalah kecemburuan sosial ini dapat dirasakan dan telah banyak dibicarakan oleh masyarakat seperti pembicaraan para pekerja sosial, lembaga-lembaga pendidikan, tulisan-tulisan di media massa, hingga masyarakat miskin itu sendiri. Namun sejauh ini belum banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap masalah kecemburuan sosial atas keberadaan PKH. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kecemburuan sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan membatasinya pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yaitu di Kecamatan Selong dengan dugaan awal berdasarkan observasi lapangan diduga ada kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan pada latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah terjadinya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ? 2. Apakah yang menyebabkan kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ? Dan 3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan prosedur *purposive*. Pada penelitian ini subjeknya terdiri atas Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur 1 orang, Kepala Seksi di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang menangani PKH 1 orang, penerima manfaat PKH 5 orang, dan masyarakat

non penerima manfaat 7 orang di Kecamatan Selong. Teknik penentuan informan penelitian ini seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2013:52) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, sebagaimana dikutip Hakim (2001:48) yang terdiri dari empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Sumber : (Prastowo, 2012:243)

Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebenaran adanya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Kebenaran adanya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Kebenarannya dapat dilihat secara langsung dengan adanya gerakan-gerakan protes dan kritis yang dilakukan oleh masyarakat, disamping dapat dilihat secara tidak langsung dengan mencermati gosip-gosip dan perbincangan informal masyarakat. Bahkan semua informan yang berstatus masyarakat non penerima manfaat PKH serentak menyatakan terdapat kecemburuan sosial atau rasa iri pada mereka atas bantuan PKH.

Realitas kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ini lebih sebagai ekspresi kritis agar pelaksanaan PKH menjadi semakin baik dan benar. Mereka tidak menginginkan PKH menjadi tidak tepat sasaran dan salah manfaat.

2. Penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut :

a. Sosialisasi Yang Tidak Sempurna

Masyarakat Kecamatan Selong mempersepsikan PKH sebagai pemberian uang oleh Negara. Mereka belum melihat PKH sebagai program pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang memang membutuhkan. Persepsi tersebut tertanam kuat di benak mereka dan membutuhkan kerja keras untuk merubahnya.

Penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) karena sosialisasi atas PKH yang tidak sempurna sehingga mereka masih mempersepsikan bahwa PKH merupakan program bagi-bagi uang secara gratis. Proses sosialisasi yang tidak sempurna atas PKH apabila masyarakat tidak mampu mendalami norma atau aturan-aturan yang terkait mengenai PKH. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami arti dan fungsi dari PKH itu sendiri. Tentunya pemerintah tidak ingin adanya hal tersebut, namun jika sudah terlanjur menjadi pembelajaran untuk melakukan perbaikan selanjutnya.

Bilamana PKH ingin diterima secara baik dan tanpa menimbulkan kecemburuan sosial, maka yang bisa dilakukan adalah memodifikasi perilaku masyarakat. Pertama adalah lingkungan, terutama pergaulan. Seseorang akan terbawa pada situasi pergaulan dimana ia nyaman berada dalam kelompok tersebut. Jika pergaulannya positif maka akan terbawa positif jika sebaliknya maka juga akan berdampak sebaliknya pula. Kedua adalah melihat penyebabnya, sosialisasi tidak sempurna akan terjadi disebabkan karena ketidak sesuaian pesan-pesan yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi PKH. Sehingga dibutuhkan kesamaan pemahaman dari semua stakeholders yang terlibat dalam PKH, terutama para Pendamping PKH di Kecamatan Selong.

b. Rasa Ketidakadilan

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Selong masih belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat khususnya sebagian mereka yang miskin merasa diperlakukan tidak adil. Rasa ketidakadilan ini timbul karena tidak semua masyarakat miskin di Kecamatan Selong mendapatkan PKH. Sekalipun mereka dijanjikan bahwa PKH diberikan secara bergilir.

c. Pola hidup konsumtif KPM

Hasil penelitian ditemukan bahwa penerima bantuan PKH memiliki gaya hidup konsumtif dilihat dari kepemilikan harta benda mereka. Dana PKH seharusnya dimaksimalkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Dari hasil penelitian di lapangan dana bantuan program PKH dimanfaatkan untuk menunjang gaya hidup mereka untuk membeli barang mewah dikarenakan didapat dari pengaruh iklan di televisi serta tidak ingin kalah saing dengan tetangga mereka.

Saat ini Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang melalui iklan. Selain itu dilapangan menggambarkan bahwasannya para penerima PKH di Kecamatan Selong tidak ingin kalah bersaing dengan para keluarga TKI. Sebagian penerima bantuan PKH lebih

mengutamakan nilai simbolik dan tanda dari barang dan jasa yang dikonsumsi.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, diketahui langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, terdiri atas :

a. Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari pemerintah Pusat dan Daerah.

Program-program dari pemerintah Pusat terdiri atas: a. perlindungan sosial yang berupa Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), b. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat yang berupa Bantuan sanitasi (jamban sehat), Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu/perbaikan rumah), Pelatihan buta aksara, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Pemerintah Daerah terdiri atas : a. Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), b. Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar, c. Bantuan Anak Terlantar (anak yatim piatu), d. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai, dan e. Bantuan Permasalahan Sosial lainnya yang dialami oleh PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

b. Mengintensifkan Sosialisasi PKH

PKH merupakan program strategis nasional dalam menanggulangi kemiskinan. Maka itu penyelenggara PKH untuk lebih mengintensifkan sosialisasi keberadaan PKH ini di tengah masyarakat, sehingga akan dapat meminimalisir kecemburuan masyarakat khususnya masyarakat non penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kegiatan sosialisasi PKH terfokus pada penerima manfaat dan pihak-pihak terkait lainnya. Sehingga terdapat kesan, PKH itu bersifat eksklusif dan terbatas. Masyarakat non penerima manfaat terkesan diabaikan. Sehingga banyak menimbulkan mispersepsi negatif dalam masyarakat atau dalam hal ini menyemarakkan kecemburuan sosial. Sehingga ke depannya, sosialisasi PKH hendaknya lebih intensif, berskala luas, dan banyak memanfaatkan saluran-saluran informal dan nonformal yang terbukti efektif untuk menyampaikan informasi tentang PKH.

c. Profesionalisme Penyelenggaraan PKH

Penyelenggara PKH dituntut untuk bekerja profesional sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Tuntutan profesionalisme penyelenggaraan PKH telah direspon secara baik oleh penyelenggara PKH, misalkan dengan menyelenggarakan pelatihan pengisian e-PKH bagi Pendamping PKH sehingga ke depan akan menerapkan e-PKH sehingga pengentrian data, pencairan bantuan, hingga pemantauan KPM dapat lebih efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan yang telah disajikan, dianalisis serta diinterpretasikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat kebenaran terjadinya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang ditemukan, gosip-gosip yang beredar, terlalu sedikitnya KPM yang dapat PKH dibandingkan jumlah keluarga miskin, dan jumlah dana yang diterima oleh KPM relatif besar.
2. Terdapat beberapa penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yaitu a. Sosialisasi yang tidak sempurna, b. Rasa ketidakadilan, dan c. Pola hidup konsumtif KPM.
3. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu a. Penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan b. Mengintensifkan sosialisasi PKH, dan c. Profesionalisme penyelenggaraan PKH.

Berdasarkan uraian kesimpulan, maka saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di satu sisi dan meminimalisir kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara PKH untuk meningkatkan komitmen dan dedikasi untuk menyelenggarakan PKH secara baik dan benar, sehingga kecemburuan sosial atas PKH di masyarakat non penerima manfaat dapat diminimalisir.
2. Hendaknya memperbaiki sosialisasi PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menumbuhkan rasa keadilan atas keberadaan PKH di masyarakat miskin, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat serta meminimalisir pola-pola hidup konsumtif pada KPM.
3. Hendaknya Pemerintah memperbanyak program-program penanggulangan kemiskinan yang langsung menyentuh kebutuhan Keluarga Sangat Miskin (KSM), sehingga mereka dapat diantarkan dalam belunggu kemiskinan. Disamping itu, Pendamping PKH untuk lebih mengintensifkan sosialisasi PKH yang tepat guna dan tepat sasaran, dan penyelenggaraan PKH supaya lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Lombok Timur. 2018. *Kecamatan Selong Dalam Angka*. Selong: BPS Lombok Timur.
- Bungin, Burhan, M. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Hadi, Sutrisno. 2011. *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Habibullah, dkk. 2017. *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

- Hakim, Abdul. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: FIA Unibraw
- Kementerian Sosial RI. 2015. *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI.
- Maryati, Kun, Juju Suryawati. 2013. *Sosiologi*, Jakarta: Esis dan Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*, Di terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UIP.
- Nainggolan, T. d. (2012). *Tinjauan Tentang Pelaksanaan PKH di Indonesia (Studi Tentang Dampak PKH pada RTSM di 7 Provinsi)*. Jakarta: P3KS Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, cetakan ketujuh, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Netra. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung.: Alfabeta.
- Paul F. 2015. *Empowering People*, terjemahan, Agus M. Hardjana, Yogyakarta: Kanisius
- Prastowo, Andi.2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Virgoreta, Dyah Ayu, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2010. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). Malang: *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No12, Hal. 1-6
- Yin, K, Robert. 2006. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Artikel, Jurnal, Makalah, Internet :

1. Brainly.co.id. diunduh Sabtu, 29 Juni 2019, jam 19.19 WITA.
2. <http://kecemburuansosial.blogspot.com>, 2015 diunduh Sabtu, 29 Juni 2019, jam 20.11 WITA.
3. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html>. diunduh Ahad, 30 Juni 2019, jam 08.10 WITA.
4. <https://dosenppkn.com/pengertian-kebijakan-publik/>. Diunduh Jum'at, 12 Juli 2019, jam 09.10 WITA.
5. <http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-lombok-timur/> Diunduh Senin, 19 Agustus 2019, jam 20.20 WITA.
6. upkh-kablotim.blogspot.com. Diunduh Jum'at, 23 Agustus 2019, jam 8.10 WITA.
7. <https://kanalntb.com/massa-akra-gelar-aksi-persoalkan-pemotongan-bpnt-dan-oknum-sdm-pkh>. Diunduh Jum'at, 23 Agustus 2019, jam 8.25 WITA.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur.